



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN DANARDONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 424298

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 862 m2/120 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 1687 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 2410 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
6. Tanah Seluas 461 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 898.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI TUCSON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA MONO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	286.020.341
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.368.020.341
III. HUTANG	Rp.	70.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.298.020.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.